

## ANALISIS REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Penulis:

**Paulus K. Allo Layuk<sup>1</sup>**

[paskal967@gmail.com](mailto:paskal967@gmail.com)

**Cornelia D. Matani<sup>2</sup>**

[corrymatani@gmail.com](mailto:corrymatani@gmail.com)

### Abstract

*Analysis of budget realization generally explains how a Regional Government uses the regional income and expenditure budget by looking at how it is realized that shows appropriate and efficient use. This research was carried out with the intention of analyzing the regional government revenue and expenditure budget, with the expected benefits of obtaining information on regional budget and expenditure revenues. Descriptive analysis has been used in this study aimed at forming a systematic description of the facts with the phenomenon being studied. The results of the study indicate that some regional income and expenditure ratios show varying results, including the existence of an instructive relationship in the independence of a Regional Government, and so far the format of expenditure by the Regional Government shows a reasonable condition in accordance with what is set.*

**Keyword: *Realization of Regional Revenue and Expenditure Budget***

### PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat, semua Daerah di Indonesia harus merencanakan, menyusun dan melaksanakan semua kegiatan dan pendanaan setiap tahun dirangkum dalam rencana keuangan tahunan dalam bentuk APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD diatur oleh PERDA. Tahun anggaran APBD mencakup periode 1 Januari hingga 31 Desember. APBD diratifikasi dan diumumkan oleh Peraturan Daerah harus diketuk palu oleh DPRD.

APBD menunjukkan alokasi pengeluaran untuk mengimplementasikan program/ kegiatan dan sumber pendapatan, serta pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Program/kegiatan dimaksud dilakukan untuk memacu ekonomi daerah, distribusi pendapatan, dan pembangunan di berbagai sektor. Pencapaian tujuan-tujuan ini diharapkan terealisasi melalui penambahan potensi pendapatan dari pajak dan retribusi daerah ditambah lagi dengan dana transfer dari Pusat yang diperuntukan untuk mendanai penyediaan layanan publik yang memadai dan berkualitas tinggi.

---

<sup>1</sup> Dosen Jurusan Akuntansi FEB-UNCEN

<sup>2</sup> Dosen Jurusan Akuntansi FEB-UNCEN

Peraturan Pemerintah adalah dasar untuk pelaksanaan kegiatan akuntansi mulai dari unit kerja pengguna anggaran, penyusun laporan keuangan oleh entitas pelaporan dan penyajian kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk audit, hingga penyerahan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah mengenai akuntabilitas untuk implementasi dari APBN / APBD. Namun, segala hal menyangkut laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD oleh legislatif atau penggunaan laporan oleh pihak-pihak terkait tidak cakup pengaturannya dalam peraturan pemerintah ini.

Pegunungan Bintang yang termasuk sebagai wilayah pemekaran baru juga menyajikan APBD sesuai amanat peraturan. Penulis tertarik menganalisis APBD Kabupaten Pegunungan Bintang setelah beberapa tahun perkembangannya dalam menyelenggarakan pemerintahan terutama setelah implementasi pencatatan akuntansi berbasis akrual. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis APBD Pegunungan Bintang.

Instrumen fundamental yang digunakan dalam kebijakan fiskal yaitu APBD yang digunakan untuk menyelenggarakan layanan publik di daerah. Sehingga diharapkan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan diberbagai sektor. Pada Permendagri No.33 tahun 2017, APBD merupakan rencana keuangan jangka pendek yaitu dalam kurun waktu satu tahunan yang tuangkan dalam PERDA oleh pemerintahan daerah.

APBD adalah kerangka keuangan tahunan daerah yang disepakati bersama oleh DPRD dengan pemerintah, yang intinya menggambarkan sumber-sumber pendapatan daerah, berapa alokasi pengeluaran untuk melaksanakan program / kegiatan, dan pembiayaan yang muncul saat surplus atau deficit (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (KEMENENKEU), 2014).

Sementara, menurut Ramadani (2017), APBD dapat didefinisikan sebagai rencana keuangan pemerintah daerah yang mendeskripsikan mengenai perkiraan pengeluaran yang sebesar-besarnya dalam belanja kegiatan dan proyek daerah dalam satu tahun, serta juga dapat menggambarkan mengenai estimasi pendapatan dan sumberpendapatan daerah yang digunakan untuk menutupi biaya yang dimaksud. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan (Dharmawati & Irmadariyani, 2016).

Pendapatan daerah bersumber dari penerimaan pajak, retribusi, dana transfer pusat, serta dari lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan, belanja daerah berkaitan dengan semua pengeluaran untuk

mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung atau tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (KEMENENKEU), 2014).

Sering ditemui dalam pelaksanaannya dapat terjadi selisih antara pendapatan dan pengeluaran daerah (surplus/defisit) dari penganggaran daerah yang ada, sehingga dapat dilakukan kebijakan pembiayaan daerah untuk menutup celah atau kesenjangan yang ada. Jika surplus terjadi, daerah harus menganggarkan biaya untuk pembiayaan tertentu, misalnya untuk investasi, atau juga dapat mengoptimalkan dana untuk mendanai pengeluaran yang direncanakan. Sebaliknya jika ada defisit, daerah perlu mencari alternatif pembiayaan dalam bentuk pinjaman daerah, penggunaan SILPA, atau dapat juga menghemat anggaran dengan melakukan kegiatan sweeping yang tidak perlu dilakukan atau menunda implementasi (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (KEMENENKEU), 2014).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini digunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yang mana penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis APDB Daerah. Dalam penelitian ini data sekunder berupa Dokumen Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2016 yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Waktu pelaksanaan penelitian terhitung empat bulan yaitu Mei-September 2018. Teknik pengumpulan data penelitian adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Tehnik bertanya dilakukan sebagai bagian dari wawancara langsung kepada staf atau pemimpin, seperti Kepala Badan, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Kepala Bidang Pendapatan dan Belanja Daerah dan Kepala Bidang Anggaran dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Selain itu, ada pula digunakan teknik dokumentasi dengan cara mendapatkan informasi dari buku-buku, literatur, jurnal serta dokumen yang terkait pada masalah yang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

*Rasio Kemandirian Daerah*, rasio ini mendeskripsikan tentang tingkat ketergantungan daerah pada bantuan pemerintah pusat dan propinsi. Rasio kemandirian daerah Tahun Anggaran 2014-2017 menunjukkan penurunan setiap tahunnya dengan rata-ratanya 1,51 persen, yang menurut kategori pola hubungan tingkat independensi daerah menunjukkan adanya pola instruktif, yaitu peran pemerintah

pusat dominan terhadap kemandirian daerah dan atau dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada bantuan dana Pemerintah pusat.

*Analisis Varians (selisih) Anggaran Pendapatan*, rasioni melihat mengenai selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Tujuannya untuk membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan. Berdasarkan analisis varians pendapatan, diketahui bahwa rata-rata kinerja pendapatan Pemerintah Daerah berada pada kondisi *unfavourable variance* (selisih kurang), hal ini terindikasi bahwa kinerja pendapatan belum optimal dalam memperoleh pendapatan yang seharusnya melebihi target yang dianggarkan.

*Analisis pertumbuhan pendapatan*, Rasio pertumbuhan menilai seberapa besar kemampuan daerah untuk mempertahankan dan tingkatkan kesuksesan yang sudah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya dengan pertumbuhan untuk setiap komponen pendapatan. Rata-rata rasion pertumbuhan pendapatan ini mengalami penurunan tiap tahunnya dari tahun 2014-2017, ini menunjukkan bahwa kurangnya kemampuan pemerintah dalam menggali potensi PAD yang ada pada daerah dalam menambah sumber PAD Pemerintah Daerah. *Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal*, rasio ini mengukur tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rasio Desentralisasi Fiskal dari Daerah masih sangat kecil, ini terlihat pada rasionya yang hanya berkisar 1 persen setiap tahunnya dan masih masuk dalam klasifikasi sangat kurang mampu dalam membiayai rumah tangganya sendiri. Hal ini disebabkan karena masih sangat kecilnya penerimaan PAD jika dibandingkan dengan dana transfer pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat.

*Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah*, rasio efektivitas melihat seberapa efektifnya Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi nyata wilayah tersebut, menunjukkan bahwa kemampuan Daerah dalam merealisasikan PAD belum efektif, hal ini dapat dilihat dari tingkat rasio efektivitasnya yaitu pada tahun 2014 sebesar 30.295%, tahun 2015 (13.768%), tahun 2016 (8.820%) dan tahun 2017 (6.772%) kurang dari rata-rata 75% rasio efektivitas yang ada pada kriteria efektifitas, sehingga menunjukkan tidak efektifnya dalam merealisasikan PAD mereka yang telah direncanakan dibandingkan dengan target potensi riilnya. Sedangkan, rasio

efisiensi digunakan untuk membandingkan antara jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Dilihat dari rasio efisiensi PAD dalam empat tahun terakhir (2014-2017) terus mengalami kondisi tidak efisien. Yang artinya itu menggambarkan tingkat efisiensi semakin kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dari hasil pemungutan pajak tersebut. Sehingga, perlu adanya tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

*Analisis varians belanja*, menggambarkan analisis perbedaan antara anggaran belanja dan realisasinya. Hasil olah data analisis varians (selisih) belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014-2017, dapat dilihat bahwa terdapat varians belanja yang jumlah realisasi belanjanya di bawah anggaran yang telah ditentukan Pemerintah Daerah.

*Analisis keserasian belanja daerah*, mengindikasikan bagaimana pemerintah daerah dalam mengalokasikan dananya menaruh prioritas yang tinggi pada belanja secara optimal. Rasio belanja operasi terhadap total belanja dihitung perbandingan antara realisasi belanja operasi dengan total belanja sedangkan rasio belanja modal dihitung dengan cara menghitung perbandingan antara realisasi belanja modal dengan total belanja modal (Hiariey, 2017). Rata-rata rasio Belanja Langsung Pemerintah Daerah sebesar 79.942% untuk periode 4 tahun.

Gambaran belanja di atas ini menunjukkan, bahwa Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan belanja langsung dibandingkan dengan pembiayaan untuk belanja tidak langsung. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah lebih kurang/sedikit menggunakan dana untuk kegiatan belanja tidak langsung dibandingkan dengan pembiayaan untuk belanja langsung. Pada Pemerintah Daerah telah menunjukkan bahwa Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung.

Terdapat selisih antara rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung yaitu sebesar 41.603%, berarti Pemerintah Daerah sudah dapat meningkatkan Belanja Langsung sehingga dengan demikian kualitas dari *output* yang akan dihasilkan juga dapat mengalami peningkatan, agar fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi dapat berjalan dengan baik.

*Rasio pertumbuhan belanja*, besarnya penambahan belanja yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dari tahun-ke tahun dapat di ketahui melalui Analisis Pertumbuhan Belanja. Pertumbuhan belanja

yang selalu positif menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan Belanja dalam APBD semakin baik. rasio Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014-2017 menunjukkan bahwa selama tahun 2014-2016 pertumbuhan belanja adalah positif, akan tetapi pada tahun 2017 rasio pertumbuhan belanja menunjukkan hasil yang negatif. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut, pada tahun 2015, rasio Pertumbuhan Belanja Daerah sebesar 26.51% yang mana merupakan tingkat rasio Pertumbuhan Belanja yang cukup besar.

Kemudian, tingkat rasio Pertumbuhan Belanja mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi 13.01% dan menjadi tingkat rasio yang negatif pada tahun 2017 dengan nilai sebesar (14.12%). Dengan demikian secara umum Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang kurang mengupayakan pemanfaatan Belanja dalam APBD yang memadai sehingga menunjukkan hasil yang berbeda selama periode 4 tahun.

*Analisis rasio efisiensi belanja*, Rasio Efisiensi Belanja menggambarkan mengenai seberapa besar perbandingan antara realisasi belanja / pengeluaran daerah dan anggaran. menunjukkan bahwa rasio Efisiensi Belanja dalam periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang telah melakukan efisiensi dengan baik.

Pada tahun 2014, rasio efisiensi belanja Pemerintah Daerah sebesar 86.80%, akan tetapi mulai mengalami kenaikan diantara tahun 2015 sebesar 89.41% dan tahun 2016 sebesar 90.32%, yang kemudian mengalami penurunan di tahun 2017 yaitu sebesar 86.42%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa rasio efisiensi belanja mulai dari tahun 2014-2017 yaitu kurang dari 100 persen dimana semakin kecil rasio belanja, semakin efisien, dan sebaliknya. APBD akan efisien jika rasionya kurang dari 100 persen atau sebaliknya.

*Analisis pembiayaan*, Analisis pembiayaan merupakan perbandingan antara sisa perhitungan anggaran (SILPA) dari tahun ke tahun, semakin besar SILPA menunjukkan indikator kurang tepatnya penyajian kesehatan suatu anggaran. menunjukkan bahwa SILPA Pemerintah Daerah ada kecenderungan terjadi penurunan. Pada tahun 2014 SILPA Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar Rp 183,030,305,088, dan tahun 2015 mengalami penurunan pada Rp 140,884,984,206, di tahun 2016 sisa perhitungan anggaran Pemerintah Daerah menunjukkan penurunan sebesar Rp 106,197,079,234, dan pada tahun 2017 juga menunjukkan bahwa SILPA Pemerintah Daerah sebesar Rp

106,197,079,234 atau sama dengan tahun 2016. Kecenderungan penurunan SILPA ini dapat mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang telah tepat dalam penyajian APBD.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis kinerja keuangan daerah pada analisis pendapatan daerah, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pola hubungan kemandirian daerah ada pada kriteria instruktif. Dalam model hubungan Instruktif, peran Pemerintah Pusat lebih menonjol terhadap kemandirian Pemerintah Daerah dapat dikatakan Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada pendanaan dari Pemerintah Pusat.

Sedangkan, Analisis Varians Anggaran Pendapatan bahwa kinerja pendapatan Pemerintah Daerah menunjukkan kinerja yang kurang baik dimana nilai selisih dari anggaran pendapatan dan realisasi pendapatannya terdapat selisih kurang (*unfavourable variance*) dan meningkatnya kondisi yang kurang menguntungkan tersebut tiap tahunnya yang menunjukkan bahwa seharusnya pemerintah daerah mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang ditargetkan sehingga menunjukkan kinerja pendapatan yang baik dalam mengelola dan merealisasikan Anggaran Pendapatan yang ada.

Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini dapat dikarenakan kurangnya kemampuan pemerintah dalam menggali potensi PAD di Daerah dalam menambah sumber PAD pemerintah daerah. Dari Analisis Tingkat Desentralisasi Fiskal diketahui bahwa rasio Desentralisasi Fiskal Daerah masih kecil, ini tergambar pada rasionya yang hanya berkisar 1% setiap tahunnya dan masih masuk dalam klasifikasi kurang mampu dalam membiayai rumah tangganya sendiri. Hal ini disebabkan karena masih sangat kecilnya penerimaan PAD jika dibandingkan dengan transfer pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat.

Rasio Efektivitas menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam merealisasikan PAD rata-rata tidak efektif. Berdasarkan hasil analisis belanja daerah, dapat dilihat bahwa; hasil olah data analisis varians (selisih) belanja Tahun Anggaran 2014-2017, dapat dilihat bahwa terdapat varians belanja yang jumlah realisasi belanjanya di bawah anggaran yang telah ditentukan Pemerintah Daerah, ini menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah dinilai baik dalam merealisasikan biayanya yang menunjukkan realisasi biaya yang lebih rendah dari yang di targetkan.

Dari Analisis Keserasian Belanja pada Analisis Belanja Langsung diperoleh informasi mengenai belanja langsung Tahun Anggaran 2014-2017, yang mana rasio belanja langsung mengalami penurunan dari 98.12% tahun 2014 ke 49.11% pada tahun 2017. Sedangkan untuk Rasio Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Pengunungan Bintang Tahun Anggaran 2014-2017, menunjukkan bahwa rasio belanja tidak langsung mengalami kenaikan dari 33.80% - 42.76% pada tahun 2014-2016, akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 37.67%.

Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah lebih kurang/sedikit menggunakan dana untuk kegiatan belanja tidak langsung dibandingkan dengan pembiayaan untuk belanja langsung. Pada Rasio Pertumbuhan Belanja Tahun Anggaran 2014-2017 menunjukkan bahwa selama tahun 2014-2016 pertumbuhan belanja adalah positif, akan tetapi pada tahun 2017 rasio pertumbuhan belanja menunjukkan hasil negatif.

Dengan demikian secara umum Pemerintah Daerah kurang mengupayakan pemanfaatan Belanja dalam APBD yang memadai sehingga menunjukkan hasil yang berbeda selama periode 4 tahun. Untuk Rasio Efisiensi Belanja menunjukkan bahwa Pemerintah periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 Pemerintah Daerah telah melakukan efisiensi dengan baik. Ini menunjukkan bahwa rasio efisiensi belanja mulai dari tahun 2014-2017 yaitu kurang dari 100 persen dimana semakin kecil rasio belanja maka semakin efisien dan sebaliknya. Pada Analisis Pembiayaan menunjukkan bahwa SILPA Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang ada kecenderungan terjadi penurunan. Kecenderungan penurunan SILPA ini dapat mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang telah tepat dalam penyajian APBD.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, S. (2012). Perilaku Oportunistik Legislatif dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Bukti Empiris dari Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. *Ringkasan Disertasi*. Universitas Gajah Mada.
- Andvig, Jens Chr., Odd-Helge Fjeldstad, Inge Amundsen, Tone Sissener & Tina Søreide. (2001). Corruption A Review of Contemporary Research. *Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights Report R 2001: 7*. Web: <http://www.cmi.no>.
- Anggraini, Y., & Puranto, H. B. (2010). Anggaran Berbasis Kinerja. Penyusunan APBD Secara Komprehensif. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

- Basri, R. (2014). *Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara*. Universitas Sam Ratulangi. (<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/2651/2204>). Diakses tanggal 03 Juni 2018.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga, Erlangga, Yogyakarta
- Bisma, I. D. G., & Susanto, H. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. *Gance Swara*, Edisi Khusus, Vol. 4(5), Desember 2010.
- Dharmawati, M. K., & Irmadariyani, R. (2016). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Manilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (KEMENKEU). (2014). Deskripsi Dan Analisis APBD 2014.
- Faria, J. A. D & Silva, S. M. G. D .(2013). The effects of information asymmetry on budget slack: An experimental research. *African Journal Business of Management*, Vol. 7 (13), pp. 1086-1099. <http://www.academicjournals.org/AJBM>
- Gilardi, Fabrizio. (2001). Principal-agent models go to Europe: Independent regulatory agencies as ultimate step of delegation. *Paper presented at the ECPR General Conference*, Canterbury (UK), 6-8 September 2001.
- Gita, S. (2014). *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Selatan*. Jurnal, Hal 1-10. STIE Multi Data Palembang. (<http://eprints.mdp.ac.id> › Jurnal). Diakses tanggal 03 Juni 2018.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol. 2 (1), pp. 53-64.
- Halim, Abdul. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta
- Handoko, A. W. (2014). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Berbasis Kinerja Pada Dispenda Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 3 (12)
- Hiariey, C. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Ambon. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Gajayana Malang.
- Honga, A. F., & Ilat, V. (2014). Analiss Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, Vol. 2(4), pp. 278-288.
- Indriani, Y. F. (2013). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Komitmen Organisasi sebagai Variable Moderating (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi)*. Jurnal, Hal 75-81. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. (<http://online-journal.unja.ac.id> › article › view). Diakses tanggal 03 Juni 2018.

- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Komang, S. E. (2014). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja). e-journal S1 Ak Volume 2 No. 1 Tahun 2014 Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. (<http://e-journal.undiksha.ac.id> > article > view). Diakses tanggal 03 Juni 2018.
- Korompot, R. (2015). *Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014*. Universitas Sam Ratulangi Manado. (<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7612>). Diakses tanggal 03 Juni 2018.
- Lane, Jan-Erik. (2000). *The Public Sector-Concepts, Models and Approaches*. London: SAGE Publications.
- \_\_\_\_\_. (2003a). *Management and Public Organization: The Principal-Agent Framework*. University of Geneva and National University of Singapore. *Working paper*.
- Latifah, N. (2010). Adakah Perilaku Oportunistik Dalam Aplikasi Agency Theory Di Sektor Publik. *Fokus Ekonomi, Vol. 5(2), pp. 85-94*.
- Lomboan, M. S. (2014). Analisis Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA, Vol 2*. Akses tgl 03 Juni 2018. pp.952-961
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moe, T. M. (1984). The new economics of organization. *American Journal of Political Science* , Vol. 28(5), pp. 739-777.
- Nurhayati. (2015). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, Vol. 4 (1), pp. 55-66*.
- Prasetya. E. G. (2005). *Penyusunan Dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
- Ramadani, R. F. (2017). Analisis Kinerja Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda. *Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*.
- Sadeli, L. (2015). *Dasar-Dasar Akuntansi. Edisi Pertama*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Santosa, O. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA, Vol 2*. Akses tgl 03 Juni 2018. pp 1512.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian kuantitatif & kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu

- Strom, K. (2000). Delegation and accountability in parliamentary democracies. *European Journal of Political Research*, Vol. 37, pp. 261-289.
- Tulangow, A. P & Runtu, T. (2016). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, Vol. 4(3), pp. 564-671.
- Wenny, C. D. (2012). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. *Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP*, Vol. 2(1), pp. 39-51.
- Yin, R. K. (2006). *Studi Kasus-Desain & Metode*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yohanes, Y. S. (2011). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) kotamojokerto*. Jurnal, Hal 17-26. Program Studi/Jurusan Sistem Informasi. STIKOM Surabaya. (<http://sir.stikom.edu/493/>). Diakses tanggal 03 Juni 2018.
- Yuliana. (2013). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD) Ditinjau Dari Rasio Keuangan. Studi Kasus Pada Kabupaten Sragen. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Internet

<http://pegbintangkab.go.id/sekilas-pegunungan-bintang>  
<http://pegbintangkab.go.id/visi-dan-misi>